

TESIS

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH BIDANG LAINNYA TERHADAP *STUNTING*
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2015-2022**

WINDA



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH BIDANG LAINNYA TERHADAP *STUNTING*
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2015-2022**

Disusun dan diajukan oleh:

WINDA

A052221002



Kepada:

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG LAINNYA TERHADAP STUNTING DI KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2015-2022

disusun dan diajukan oleh:

WINDA
A052221002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal **5 Maret 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

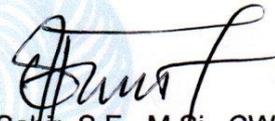
Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



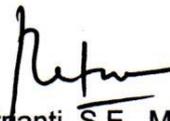
Dr. Madris, S.E., DPS., M.Si., CWM®
NIP. 196012311988111002



Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM®
NIP. 197407152002121003

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Sumberdaya,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Dr. Retno Fitrianti, S.E., M.Si., CWM®
NIP. 197709132002122002



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM.
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDA

NIM : A052221002

Program Studi : Magister Ekonomi Sumber Daya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya Terhadap *Stunting* Di Kawasan Indonesia Timur Tahun 2015-2022. Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 Maret 2024

Yang menyatakan,



Winda

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam, Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Semata karena atas kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/tesis ini. "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan". Maha benar Allah SWT atas segala firman-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada sebaik-baik suri tauladan yaitu Muhammad SAW, yang membawa manusia dari lembah kejahiliyaan menuju puncak kejayaan Islam.

Penyusunan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dukungan secara moril dan materiil dari berbagai pihak selama masa perkuliahan hingga pada penyusunan tugas akhir, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan sebuah karya penulis yang masih jauh dari sempurna. Akan tetapi sebagai sebuah proses awal, penulis berharap tulisan ini mampu memberikan banyak pelajaran dan mampu menjadi pemantik semangat dalam melahirkan karya-karya selanjutnya. Karya yang mendidik, jujur dan karya yang telah layak baca. Harapan itu tidak hanya untuk penulis sendiri tapi untuk para pembaca sekalian. Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat, penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orangtua, Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Harmin, dalam mendidik, membesarkan, dan mendoakan penulis sampai berada pada posisi saat ini. Penulis juga sangat bersyukur dan merasa beruntung karena tidak hanya sebagai orangtua, keduanya juga sangat berperan dalam memberikan petunjuk, doa, saran, motivasi dan telah memberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Hal yang sama penulis ucapkan kepada Saudara Asriandi, SE., M.Ak., yang selalu membantu dan memberikan

semangat semasa penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Saudari Indrawati Sinus S.E., M.Si, Nurul Magfirah, S.E., Nurhumairah, S.Sos, dan Ade Irma S.E., yang telah memberi banyak bantuan pada penelitian dan memberi banyak pelajaran motivasi hingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Madris, DPS., S.E., M.Si. Sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Sabir, S.E., M.Si, SE., M.Si. Sebagai pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini. Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S2. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. Beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas dan ketua Prodi Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si. CWM[®]. Terimah kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh anggota tim penguji Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si. CWM[®]., Ibu Dr. Retno Fitrianti., S.E., M.Si. CWM[®]., dan Ibu Dr. Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si. CWM[®]., sebagai tim penguji yang sudah memberikan saran dan arahan karena telah meluangkan waktu dalam memberikan kritik serta saran yang sangat berguna atas penyempurnaan tesis ini.

Dan kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program S2 Ekonomi Sumber daya Unhas dan Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Pasca Ekonomi Unhas yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan akademik. Penulis tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada Semua pihak yang telah membantu selama penulis menjalani perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, namun demikian penulis berharap tesis ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, Januari 2024

Winda

ABSTRAK

WINDA. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya terhadap Stunting di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015 – 2022* (dibimbing oleh Madris dan Sabir).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang sumber daya manusia dan pengeluaran pemerintah bidang lainnya terhadap *stunting* melalui produk domestik regional bruto dan pengeluaran konsumsi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia. Data yang digunakan ialah data sekunder. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel pada sembilan provinsi di Kawasan Timur Indonesia antara tahun 2015 - 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang sumber daya manusia memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *stunting* melalui produk domestik regional bruto dan pengeluaran konsumsi masyarakat. Variabel pengeluaran pemerintah bidang lainnya memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap *stunting* melalui produk domestik regional bruto dan pengeluaran konsumsi masyarakat. Hasil penelitian tersebut merupakan bentuk fenomena dalam menurunkan angka prevalensi *stunting*. Direkomendasikan bahwa perlu dilakukan peninjauan sistem pengeluaran pemerintah agar dapat lebih tepat sasaran dalam memaksimalkan pengeluaran demi upaya menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kawasan Timur Indonesia.

Kata kunci: *stunting*, pengeluaran konsumsi masyarakat, produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah bidang sumber daya manusia, pengeluaran pemerintah bidang lainnya



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Beberapa Kajian/Landasan Teori.....	15
2.1.1. Pengertian dan Konsep Prevalensi <i>Stunting</i>	15
2.1.2. Pengertian dan Konsep Pengeluaran Konsumsi Masyarakat	20
2.1.3. Pengertian dan Konsep Produk Domestik Regional Bruto	22
2.1.4. Pengertian dan Konsep Pengeluaran Pemerintah	24
2.2. Hubungan antar Variabel	29
2.2.1. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia Terhadap <i>Stunting</i>	29
2.2.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya Terhadap <i>Stunting</i>	32
2.2.3. Hubungan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Terhadap <i>Stunting</i>	33
2.2.4. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap <i>Stunting</i>	37
2.2.5. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia Terhadap Pengeluaran Konsumsi Masyarakat.....	41
2.2.6. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya Sumber Daya Manusia Terhadap Pengeluaran Konsumsi Masyarakat	42

2.2.7. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	44
2.2.8. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya Sumber Daya Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	48
2.2.9. Hubungan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	52
2.3. Tinjauan Empiris	53
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	57
3.1. Kerangka Pikir Penelitian	57
3.2. Hipotesis Penelitian	60
BAB IV METODE PENELITIAN.....	61
4.1. Pendekatan Penelitian.....	61
4.2. Tehnik Pengumpulan Data	61
4.3. Tehnik Analisis Data	62
4.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	65
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	67
5.1. Gambaran Umum Hasil Penelitian	67
5.2. Deskripsi Variabel Penelitian	67
5.2.1. Deskripsi Prevalensi Stunting 9 Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2022	67
5.2.2. Deskripsi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat 9 Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2022	69
5.2.3. Deskripsi Produk Domestik Regional Bruto 9 Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2022	71
5.2.4. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia 9 Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2022	73
5.2.5. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya 9 Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2022	76
5.3. Hasil Penelitian	80
5.3.1. Uji Koefisien Determinan $R^2(Y_1)$	80
5.3.2. Uji Simultan F (Y_1)	81
5.3.3. Uji Koefisien Determinan $R^2(Y_2)$	82
5.3.4. Uji Simultan F (Y_2).....	82
5.3.5. Uji Koefisien Determinan $R^2(Y_3)$	83

5.3.6. Uji Simultan F (Y3).....	84
5.3.7. Bagan Hasil Penelitian.....	84
5.3.8. Uji Parsial (t)	85
5.4. Pembahasan	89
5.4.1. Analisis Pengaruh Secara Langsung dan Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM Terhadap <i>Stunting</i> Melalui Produk Domestic Regional Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat).....	90
5.4.2. Analisis Pengaruh Secara Langsung dan Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM Terhadap <i>Stunting</i> Melalui Produk Domestic Regional Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat	93
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	97
6.1. Kesimpulan.....	97
6.2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Prevalensi <i>Stunting</i> di Kawasan Timur Indonesia.....	03
Tabel 1.2. Pengeluaran Konsumsi Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia ...	05
Tabel 1.3. Produk Domestik Regional Bruto di Kawasan Timur Indonesia	07
Tabel 5.1. Prevalensi <i>Stunting</i> di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2022	68
Tabel 5.2. Pengeluaran Konsumsi Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2022	70
Tabel 5.3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2022	72
Tabel 5.4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2022	75
Tabel 5.5. Pengeluaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2022	78
Tabel 5.6. Hasil Estimasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	80
Tabel 5.7. Hasil Estimasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya Terhadap Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Melalui Produk Domestik Regional Bruto	81
Tabel 5.8. Hasil Estimasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya Terhadap <i>Stunting</i> Melalui Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat	83

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1. Kerangka Pikir Penelitian.....	60
Gambar 5.1. Bagan Hasil Penelitian.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Rekap Data Penelitian.....	100
Lampiran 2 Hasil Regresi Uji Autokorelasi dan Regresi Linear Berganda.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

. *Stunting* pada anak merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. *Stunting* menjadi masalah yang sangat serius karena berkaitan dengan risiko kesakitan dan kematian, obesitas dan penyakit tidak menular di masa depan, buruknya perkembangan kognitif dan rendahnya produktivitas serta pendapatan, dengan kata lain *stunting* akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dikemudian hari (Paramashanti, et al, 2016).

Anak mengalami *stunting* sebagai akibat dari kekurangan gizi terutama pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Saat ini jumlah anak balita di Indonesia sekitar 22,4 juta, setiap tahun setidaknya ada 5,2 juta perempuan di Indonesia yang hamil, dimana dari mereka rata-rata bayi yang lahir setiap tahun berjumlah 4,9 juta anak, tiga dari sepuluh balita di Indonesia mengalami *stunting* atau memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya tidak hanya bertubuh pendek efek domino pada balita yang mengalami *stunting* lebih kompleks. Selain persoalan fisik dan perkembangan kognitif, balita *stunting* juga berpotensi menghadapi persoalan lain di luar itu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Stunting ketika usia balita pada umumnya sering tidak disadari oleh keluarga dan setelah 2 tahun baru terlihat dan berdampak pada kemampuan kognitif dan produktivitas jangka panjang bahkan bisa berdampak pada kematian (Oktarina & Sudiarti, 2014). Negara Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masuk dalam grup yang mempunyai prevalensi *stunting* cukup tinggi yaitu 30-39 persen. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-5 dunia dengan jumlah anak *stunting* terbanyak. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari India, Tiongkok, Nigeria

dan Pakistan (Trihono et al, 2015). Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir *stunting* memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah lainnya seperti kurang gizi, kurus dan gemuk. Prevalensi balita *stunting* mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 27,5 persen menjadi 29,6 persen pada tahun 2017. Prevalensi balita yang mengalami *stunting* di Indonesia cenderung statis. (Trihono et al, 2015).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2017 menunjukkan prevalensi balita *stunting* di Indonesia sebesar 36,8 persen. Prevalensi balita *stunting* dalam hal ini mengacu pada presentasi jumlah balita disuatu populasi yang mengalami penyakit berupa *stunting* dalam pertumbuhan fisiknya. Pada tahun 2010 prevalensi *stunting* di Indonesia mengalami sedikit penurunan menjadi 35,6 persen. Namun pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 37,2 persen (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018).

Sampai saat ini belum ada laporan di Indonesia mengenai tren prevalensi berat badan yang kurang, *stunting* dan kelebihan berat badan pada anak usia 2,0-4,9 tahun bersama dengan faktor risiko yang terkait. Pemahaman yang lebih baik tentang beban ganda gizi buruk di Indonesia terutama pada anak usia dini akan membantu dalam pengambilan keputusan tentang strategi potensial untuk mengatasi masalah tersebut (Rachmi et al. 2016).

Hasil penelitian Agus (2017) terhadap negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin menunjukkan bahwa tingkat kematian anak yang mengalami *stunting* dan kekurangan berat badan tiga kali lebih besar dibandingkan anak dengan gizi memadai. Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap penurunan angka *stunting* mengingat angka prevalensi *stunting* Indonesia masih tergolong tinggi. Kawasan Timur Indonesia merupakan salah satu daerah yang memiliki angka prevalensi *stunting* tertinggi.

Tingginya angka prevalensi stunting ini berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Berikut merupakan 9 provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki angka prevalensi stunting yang cukup tinggi.

Tabel 1.1
Data Stunting 9 provinsi Di Kawasan Timur Indonesia
Tahun 2018-2021

Provinsi	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Bali	14,32%	14,41%	12,61%	10,90%
Nusa tenggara barat	30,80%	31,21%	30,41%	29,70%
Nusa tenggara timur	43,70%	43,80%	40,80%	37,80%
Sulawesi utara	21,61%	30,11%	26,11%	21,61%
Sulawesi tengah	30,80%	31,21%	30,42%	29,71%
Sulawesi selatan	30,11%	21,11%	24,22%	27,41%
Sulawesi tenggara	31,02%	31,40%	30,82%	30,22%
Maluku	30,90%	30,33%	29,51%	28,70%
Papua	31,02%	24,51%	27,01%	29,50%

Sumber: BPS, 2022

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa angka prevalensi *stunting* 9 provinsi di Kawasan Timur Indonesia dari tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Kawasan Timur Indonesia merupakan daerah yang memiliki angka prevalensi *stunting* tertinggi. Angka prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 yaitu sebesar 43,7 persen dan angka prevalensi stunting terendah terdapat pada provinsi Bali pada tahun 2022 yaitu sebesar 10,90 persen. Pemerintah Indonesia masih harus berupaya maksimal untuk menurunkan angka prevalensi *stunting*, karena penurunan prevalensi *stunting* masih belum terlihat signifikan dan masih tergolong cukup tinggi.

Dampak yang paling merugikan akibat *stunting*, yaitu *stunting* dapat mengurangi IQ sebesar 5-11 poin dimana ketika anak yang mengalami masalah *stunting* duduk dibangku sekolah memungkinkan nilai anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak yang gizinya terpenuhi, anak yang mempunyai berat badan kurang, mempunyai peluang lebih besar untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, lalu ketika anak yang mengalami *stunting* memasuki usia kerja pemasukan atau pendapatan mereka akan 10 persen lebih rendah dibandingkan pekerja yang lain. Marheni (2020) menunjukkan bahwa di banyak negara, *stunting* juga berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif anak dan performa mereka di sekolah. *Stunting* memengaruhi kapasitas belajar pada usia sekolah, nilai dan prestasi sekolah, upah kerja pada saat dewasa, risiko penyakit kronis seperti diabetes, morbiditas dan mortalitas, dan bahkan produktifitas ekonomi.

Data IFLS dari 13 provinsi di Indonesia (2018) menunjukkan bahwa hampir setengah (48,6 persen) dari anak umur 7-8 tahun memiliki kemampuan kognitif yang kurang. Bayi umur 0-6 bulan yang mengalami *stunting* akan tetap pendek sampai umur 7-8 tahun yang berisiko 2,8 kali memiliki kemampuan kognitif kurang dibanding anak yang tidak *stunting*. Anak mengalami hambatan pertumbuhan disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang dan meningkatkan keutuhan metaolik serta mengurangi nafsu makan, sehingga meningkatkan kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya *stunting*.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan pentingnya peran zat gizi tidak hanya pada pertumbuhan fisik tubuh anak tetapi juga dalam pertumbuhan otak, perkembangan perilaku, motoric, dan tingkat kecerdasan anak. Selain itu, seorang anak yang sehat dan normal akan tumbuh sesuai dengan potensi genetik yang dimilikinya, apabila mendapatkan gizi yang cukup dari makanan yang

dikonsumsinya (Apriningtyas, 2019). Oleh karena itu, kecukupan konsumsi makanan yang bergizi sangat perlu menjadi perhatian serius bagi setiap rumah tangga terlebih lagi untuk rumah tangga yang memiliki balita.

Menurut Nugroho (2016), kejadian *stunting* di Indonesia dapat disebabkan oleh rendahnya konsumsi pangan hewani. Pada anak usia 2-5 tahun di Kenya dan Nigeria, asupan protein yang tidak adekuat berhubungan dengan kejadian *stunting*. Menurut Fielnanda (2018) status ekonomi yang redah berdampak pada menurunnya daya beli kebutuhan konsumsi rumah tangga yang berkualitas. Berikut merupakan data pengeluaran Konsumsi Rumah tangga 9 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia tahun 2018-2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pengeluaran Konsumsi Masyarakat 9 Provinsi
Di Kawasan Timur Indonesia
Tahun 2018-2021

Provinsi	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Bali	80.025.343,37	84.688.985,15	81.601.576,12	81.726.574,35
Nusa tenggara barat	56.577.592,59	58.442.832,99	56.703.981,43	57.753.144,92
Nusa tenggara timur	50.523.143,00	53.250.488,08	52.377.887,00	53.207.901,27
Sulawesi utara	38.874.154,20	40.973.957,93	40.014.969,70	41.690.930,70
Sulawesi tengah	49.430.810,48	50.912.269,89	48.903.258,06	50.176.300,67
Sulawesi selatan	160.726.177,62	171.693.402,60	169.776.472,59	174.115.306,60
Sulawesi tenggara	41.766.687,82	44.297.229,68	44.243.967,78	45.072.568,75
Maluku	19.221.732,78	20.261.857,58	20.157.946,29	20.260.560,90
Papua	63.233.970,71	65.574.053,85	61.911.778,26	62.640.007,92

Sumber : BPS, 2022

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat dari tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Pengeluaran konsumsi tertinggi terdapat pada provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yaitu sebesar 171 juta rupiah dan terendah terdapat pada povinsi sulawesi utara tahun 2018 yaitu sebesar 38 juta

rupiah. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang mengidentifikasi bahwasanya konsumsi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dikarenakan apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pendapatan juga akan meningkat, peningkatan permintaan barang dan jasa ini akan mendorong terjadinya kenaikan konsumsi dan begitupun sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka pendapatan juga akan mengalami penurunan Bonsu (2017).

Penurunan pendapatan ini akan menurunkan daya beli riil masyarakat sehingga permintaan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami penurunan. Penurunan permintaan barang dan jasa ini akan mendorong terjadinya penurunan konsumsi, yang tentunya apabila pengeluaran konsumsi masyarakat menurun maka akan berdampak terhadap peningkatan angka prevalensi *stunting*. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebab dari *stunting* salah satunya karena kurangnya asupan makanan yang berkualitas Bonsu (2017).

Makanan yang berkualitas merupakan makanan yang mengandung gizi yang seimbang bagi kebutuhan tubuh manusia. Pemenuhan konsumsi yang berkualitas sangatlah penting bagi kesehatan masyarakat serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Besarnya pengeluaran konsumsi masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat mengutamakan kebutuhan konsumsi. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia Larasati (2019).

Bagi suatu negara, individu maupun rumah tangga merupakan sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian, demi menjaga sumber daya manusianya suatu negara perlu memiliki perhatian besar terhadap pemenuhan konsumsi masyarakatnya, hal tersebut perlu diperhatikan bagi pemerintah Indonesia mengingat konsumsi rumah

tangga merupakan komponen Produk Domestik Bruto (PDRB) yang memiliki *share* paling besar. Berikut merupakan Produk Domestik Bruto (PDRB) 9 provinsi di Kawasan Timur Indonesia tahun 2018-2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 9 Provinsi
Di Kawasan Timur Indonesia
Tahun 2018-2021 (Juta Rp)

Provinsi	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Bali	154.072.662,61	162.694.325,00	147.549.798,09	143.864.972,47
Nusa Tenggara barat	90.349.129,08	93.869.731,82	93.269.133,91	95.437.855,96
Nusa Tenggara timur	65.929.193,54	69.385.992,38	68.806.665,28	70.540.656,64
Sulawesi utara	84.249.720,17	89.009.264,78	88.126.373,99	91.790.927,02
Sulawesi tengah	117.555.833,60	127.935.056,52	134.152.694,81	149.848.820,20
Sulawesi selatan	309.156.193,23	330.506.378,22	328.192.824,94	343.395.408,60
Sulawesi tenggara	88.310.047,92	94.053.386,68	93.446.717,48	97.276.355,71
Maluku	29.457.133,27	31.049.428,77	30.765.024,95	31.702.751,40
Papua	159.711.852,59	134.562.239,59	137.677.571,32	158.674.301,85

Sumber: BPS, 2022

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Kawasan Timur Indonesia tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. PDRB tertinggi terdapat pada provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 yaitu sebesar 343 juta rupiah dan terendah terdapat pada provinsi NTT tahun 2018 yaitu sebesar 65 juta rupiah. Hal ini menjadi gambaran bagi pemerintah daerah agar perkembangan Produk Domestik Regional Bruto dapat dibenahi sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan pada akhirnya masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah. Setiap Negara atau daerah tentu tidak terlepas dari peran pemerintah, khususnya dalam kebijakan fiskal yang berkaitan dengan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wolfson dalam Aditya (2018), bahwa kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan.

Klasifikasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi terdiri dari Sembilan fungsi yaitu pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan social (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di dalam pasal 33). Pengeluaran pemerintah yang ditujukan pada fungsi tertentu dapat menciptakan *multiplier* ekonomi melalui agregat permintaan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah, salah satunya melalui alokasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi yang tepat Susanti (2017).

Model pembangunan yang dikembangkan Rostow dan Musgrave dalam Arifin (2020), terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar, karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana baik untuk bidang Sumber Daya Manusia maupun untuk pengeluaran pemerintah bidang lainnya seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan, namun pada tahap ini peran swasta juga semakin diperlukan. Pada tahap menengah pengeluaran pemerintah dan swasta sedikit beralih pada sektor-sektor lain misalnya industri, namun pengeluaran pemerintah dan swasta ini tidak menyampingkan kepentingan publik

seperti kesehatan dan pelayanan sosial. Pada tingkat pembangunan ekonomi lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Arifin, 2020).

Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia. Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah (Akbar, 2016).

Anggaran dalam bidang bantuan sosial dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Efektifitas kebijakan fiskal daerah pada pengeluaran pemerintah terdapat 3 faktor yaitu pengeluaran bidang kesehatan, pengeluaran bidang pendidikan, pengeluaran untuk bantuan sosial membuat suatu daerah mengalami kemajuan, begitu juga dengan sumber daya manusianya yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Akbar, 2016).

Menurut Meier et al (2018) pendidikan adalah modal manusia yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga dapat kita lihat dari bagaimana masyarakat tersebut mendapatkan akses dan bagaimana sarana prasarana sektor kesehatan di daerah tersebut. Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.

Hal tersebut telah diteliti oleh Javar, et al (2017) bahwa terdapat korelasi positif antara pengeluaran kesehatan pemerintah dengan pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar disuatu wilayah. Kesehatan inti dari kesejahteraan, sementara pendidikan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang layak dan berharga. Kedua faktor tersebut mendasar untuk membentuk kemampuan manusia, dimana ini adalah inti dari signifikansi pembangunan.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan, dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif (Hendry, 2016).

Rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam penurunan angka prevalensi *stunting*, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung dalam menurunkan angka prevalensi *stunting*, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Ginting, 2018).

Pendalaman kasus, pada tahun 2022 pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 44,8 triliun untuk mendukung Program Percepatan Pencegahan *Stunting*. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 Kementerian

dan Lembaga sebesar Rp 34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun, akan tetapi angka prevalensi *stunting* tidak serta merta menurun.

Hal tersebut terlihat pada daerah papua dan NTT, dimana meskipun belanja *stunting* telah mencapai Rp.2,51 Triliun namun angka prevalensi *stunting* bukan menurun tapi justru masih mengalami peningkatan dengan selisih 5,10 persen, dari sebelumnya yaitu 29,5 persen pada tahun 2021 menjadi 34,6 persen pada tahun 2022. Sedangkan untuk provinsi NTB angka prevalensi *stuntingnya* meningkat dari 31,4 persen tahun 2021 meningkat menjadi 32,7 persen tahun 2022 peningkatan dengan selisih 1.30 persen, dengan demikian sangat perlu menjadi perhatian pemerintah mengenai solusi dari penurunan angka prevalensi *stunting* ini.

Selanjutnya untuk provinsi lain dikawasan timur Indonesia seperti NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi tenggara dan Maluku meskipun tidak mengalami peningkatan namun angka prevalensi *stuntingnya* masih tergolong sangat tinggi diikuti dengan pengeluaran konsumsi masyarakat dan PDRB yang mengalami fluktuasi sehingga sangat perlu menjadi perhatian pemerintah, karena secara tidak langsung *stunting* berdampak pada menurunnya PDRB yang tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran perubahan besarnya PDRB. Semakin besar PDRB berarti pendapatan juga meningkat yang akan mempengaruhi daya beli, kemudian berpengaruh pada tingkat konsumsi dan asupan gizi yang akhirnya mempengaruhi kejadian *stunting*.

Makin besar pertumbuhan ekonomi maka kejadian *stunting* akan semakin kecil, Wahyuni (2020). Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian, (Soleh, 2015) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk bidang Sumber Daya Manusia dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan di saat bersamaan meningkatkan kesetaraan dan menurunkan kemiskinan.

Wahyuni (2020) menjelaskan bahwa ketika pemerintah menggunakan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi untuk membiayai layanan kesehatan dasar dan akses terhadap pendidikan bagi semua akan membawa keuntungan ganda bagi masyarakat miskin, yaitu tingkat kesehatan dan pendidikan yang lebih baik serta akan meningkatkan konsumsi mereka sehingga secara tidak langsung menurunkan angka prevalensi *stunting*.

Kemudian pengeluaran pemerintah Bidang lainnya diyakini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berdampak negatif terhadap *Stunting*. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang lainnya akan berdampak terhadap peningkatan angka harapan hidup dan pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kapasitas dan kualitas kerja masyarakat. Kondisi tersebut pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan akan berakibat pada menurunnya angka prevalensi *stunting*. Berdasarkan uraian di atas, menarik diteliti mengenai **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya Terhadap Prevalensi *Stunting* Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari pembahasan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengeluaran pemerintah bidang sumber daya manusia berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap *stunting* melalui produk domestik regional bruto dan pengeluaran konsumsi masyarakat?
2. Apakah pengeluaran pemerintah bidang Lainnya berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap *stunting* melalui produk domestik regional bruto dan pengeluaran konsumsi masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah bidang sumber daya manusia berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap *stunting* melalui produk domestik regional bruto dan pengeluaran konsumsi Masyarakat.
2. Untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah bidang Lainnya berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap *stunting* melalui produk domestik regional bruto dan pengeluaran konsumsi Masyarakat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dibuat manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama.

2. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan khususnya yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. *Stunting*

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak akibat dari gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososialis yang tidak adekuat (WHO, 2015). Hal ini secara permanen dapat membatasi kapasitas fisik dan kognitif anak serta menyebabkan kerusakan seumur hidup (UNICEF, 2018). *Stunting* pada masa anak-anak memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang mempengaruhi kesehatan, perkembangan sumber daya manusia dan perekonomian (WHO, 2013).

Stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) dengan ambang batas (Z-score) < -2 standar deviasi (SD) Kementerian Kesehatan RI (2017). *Stunting* pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderita mudah sakit dan memiliki postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga kurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia MCA-Indonesia (2015)

Stunting merupakan perbedaan panjang badan yang terjadi dengan yang seharusnya pada perkembangan usia bayi, sesuai dengan *WHO Child Growth Standards*, perbandingan panjang/tinggi badan di bawah -2 SD dalam kelompok usia yang berkaitan (Onis dan Branca, 2016). *Stunting* juga merupakan sindrom, yaitu suatu kejadian turun temurun pada suatu kelompok masyarakat. Suatu kejadian yang merupakan penyimpangan dari yang seharusnya berkembang secara linear.

Bila gagal tumbuh pada dua tahun pertama, maka akan berakibat menjadi dewasa yang pendek. Permasalahan pokok bukanlah hanya pada tinggi badan, tetapi masa pertumbuhan *spinal* dan sel otak terjadi pada masa kehamilan sampai pada usia bayi dua tahun (Branca dan Onis, 2016).

Ciri-ciri kekerdilan (*Stunting*) yaitu: tanda pubertas, usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan *eye contact*, pertumbuhan terhambat, wajah tampak lebih muda dari usianya, pertumbuhan gigi terlambat dan performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. *Stunting* memiliki dampak buruk yang dapat ditimbulkan, diantaranya dampak jangka pendek dan jangka panjang, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang, akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, kanker dan disabilitas pada usia tua.

Faktor penyebab terjadinya *Stunting* terdiri atas faktor keluarga dan rumah tangga dan praktek pengasuh yang kurang baik. Faktor keluarga dan rumah tangga disebabkan karena nutrisi yang buruk selama prekonsepsi, kehamilan dan laktasi. Selain itu juga dipengaruhi perawakan ibu yang pendek, infeksi, kehamilan muda, kesehatan jiwa dan persalinan premature, jarak persalinan yang dekat dan hipertensi. Lingkungan rumah, dapat disebabkan oleh stimulus dan aktivitas yang tidak kuat, penerapan asuhan yang buruk, ketidak amanan pangan, aplikasi pangan yang tidak tepat dan rendahnya edukasi pengasuh.

Sedangkan praktek pengasuh yang kurang baik disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi ada yang menunjukkan bahwa 60 persen dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan

ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi.

Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani masalah *stunting* Siswati (2018) diantaranya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2020 UU NO.17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 200-2025 menyatakan bahwa pembangunan pangan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup seimbang, serta terjamin keamanannya. Selain itu, melalui program pembangunan nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100 persen rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan 2015-2019 adalah program Indonesia sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Salah satu sasaran pokok adalah meningkatnya status kesehatan gizi Ibu dan anak, dalam RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan target penurunan prevalensi *stunting* balita 0-23 bulan menjadi 28 persen pada 2019.

Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Permenkes tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan upaya perbaikan gizi perseorangan dan perbaikan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kelompok rawan gizi. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi

(RAN-PG) 2016-2019 Kebijakan 19 strategis pangan dan gizi fokus pada :1) Ketersediaan pangan, 2) Keterjangkauan pangan, 3) Pemanfaatan pangan, 4) Perbaikan gizi masyarakat, 5) Penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2015-2019 Misi yang tertuang dalam rencana strategis BKKBN yang berkaitan dengan malnutrisi pada anak termasuk stunting adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera (misi ke-4) dan mewujudkan Indonesia yang berdaya saing (misi ke-5), dalam kaitannya mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera, BKKBN telah menetapkan arah strategi dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kependudukan dan KB.

Strategi dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kependudukan dan KB terdiri atas: 1) Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, 2) Advokasi dan KIE tentang kependudukan dan KB, 3) Pembinaan ketahanan remaja yang dilakukan melalui Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK- KRR) dan mendorong kegiatan remaja yang positif dengan meningkatkan status kesehatan dan mendapatkan pendidikan, 4) Memahami nilai-nilai pernikahan, 5) Mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki, 6) Peningkatan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana (Genre), 7) Mengembangkan Kampung KB sebagai lintas sector, 8) Peraturan Presiden (Perpres) No.42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Perpres ini diikuti dengan Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi dalam Rangka Seribu Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK).

2.1.2. Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

Pengeluaran konsumsi masyarakat Sadono (2012) mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan nilai pembelajaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Belanja berbagai jenis barang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, digolongkan sebagai konsumsi. Sedangkan barang-barang yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.

Pola konsumsi masyarakat berdasarkan alokasi penggunaannya dapat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pola konsumsi masyarakat Indonesia dalam kurung waktu dua puluh tahun hampir tidak mengalami perubahan. Pada tahun 1984 konsumsi masyarakat Indonesia sekitar 63,24 persen dari konsumsinya dialokasikan untuk makanan dan setiap tahun terus mengalami penurunan sehingga mencapai 6,86 persen pada tahun 1993 (Dumairy, 2004). Banyak alasan yang menyebabkan analisis makroekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumah tangga secara mendalam. Alasan pertama, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya.

Setiap tahunnya penduduk Indonesia selalu meningkat, kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa juga meningkat. Pada pertengahan tahun 1997 sampai tahun 1998, konsumsi masyarakat Indonesia sempat mengalami penurunan karena terjadi krisis nilai tukar rupiah yang terus mengalami (depresiasi), yang kemudian disusul dengan krisis moneter dan pada akhirnya berubah menjadi krisis ekonomi yang menimbulkan konsekuensi terhadap ketidak stabilan perekonomian Indonesia, dari kebijakan tersebut berdampak pada melemahnya daya beli

masyarakat karena pendapatan masyarakat tetap sementara harga-harga barang dan jasa naik. Selain itu juga tingkat suku bunga mengalami peningkatan cukup signifikan di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan konsumsi masyarakat mengalami penurunan karena masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank dengan kompesasi bunga dari pada konsumsi, (Brilliant, 2008).

Lestari (2016) mengemukakan bahwa faktor-faktor pengeluaran konsumsi adalah pendapatan, selera, fafctor sosial, kultur, kekayaan, hutang pemerintah, *capital gain*, tingkat suku bunga, tingkat harga, *money illusion*, distribusi, umur, letak geografis dan distribusi pendapatan. Pada dasarnya faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumsi adalah pendapatan namun tidak dapat dipengaruhi terhadap faktor-faktor yang lain cukup berpengaruh kuat terhadap konsumsi masyarakat.

(Ani, 2010) mengemukakan bahwa salah satu kebijakan fiskal oleh pemerintah adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau dapat juga dikaitkan dengan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Teori Keynes mengandalkan analisis statistik dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan intropeksi dan observasi casual. Pertama dan terpenting Keynes menduga bahwa kecenderungan mengonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengonsumsi marginal adalah krusial bagi rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas.

Kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh penggada kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi. Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*) turun Ketika pendapatan naik. Keynes percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga berharap bahwa orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin. Ketiga Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang terpenting sedangkan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes menyatakan pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya batas teori. Kesimpulannya bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan relative tidak penting.

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurung waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2016) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, perkembangannya ialah terdapat pada aspek yaitu proses output perkapita serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2018). Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional adalah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrzal, 2013).

PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2016). Sedangkan berdasarkan BPS (2018) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB berdasarkan harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Berikut merupakan metode perhitungan PDRB yaitu sebagai berikut : 1) Pendekatan Produksi, dimana PDRB adalah jumlah produk barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi disuatu daerah dalam jangka waktu periode tertentu, 2) Pendekatan Pendapatan dimana PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu periode tertentu, 3) pendekatan pengeluaran dimana PDRB merupakan semua komponen permintaan

akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi dan ekspor neto.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari nilai PDRB suatu daerah menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dalam perekonomian yang memicu untuk memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja meningkat, pada gilirannya pendapatan masyarakat akan meningkat dan akhirnya memungkinkan masyarakat mengonsumsi jumlah barang dan jasa lebih banyak serta beragam (Mankiw, 2014).

2.1.4. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan barang-barang modal, barang-barang konsumsi dan jasa-jasa. Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan negara atau pemerintah guna mewujudkan fungsinya dalam menciptakan kesejahteraan (Hajrawati, 2021). Menurut Zulyanto, (2018) pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan pemerintah, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Wegner (dalam Soetrisno 2018) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi. Teori pengeluaran pemerintah memiliki dua jenis teori yaitu teori mikro pengeluaran pemerintah dan teori makro pengeluaran pemerintah. Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah ini mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.

Pada teori makro pengeluaran pemerintah ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti, model pembangunan tentang perkembangan pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (1993) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2016). Pada tahap menengah dalam pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar.

Teori makro dari pengeluaran pemerintah terdiri atas teori Adolf Wagner (Hukum Wagner), teori Peacock dan Wisema dan teori Teori Colin Clark. Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner) menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi kebudayaan dan sebagainya (Prasetya, 2012).

Teori Peacock dan Wisema mengemukakan pendapat lain dalam hal perilaku perkembangan pemerintah. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan pajak. Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Teori Colin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan, dimana Collin menyatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25 persen dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan hal ini akan mengurangi penawaran agregat. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membeli barang maupun jasa, dan pengeluaran pemerintah juga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat digunakan sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai langsung oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyaknya kegiatan pemerintah, maka semakin besar juga pengeluaran pemerintah yang akan dibiayai (Sri, 2014).

Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat (Devi, 2017). Dengan adanya kenaikan pengeluaran pemerintah tentu akan menyebabkan penambahan suatu permintaan agregat, yang dimana permintaan agregat akan selalu mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga meningkat.

Berdasarkan PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Pasal 26 dan 50, pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari dua golongan yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung terkait adanya kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan secara tidak langsung terkait adanya program dan kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya.

Pemerintah dalam menjalankan suatu perekonomian tentu memiliki beberapa fokus utama dalam hal menganggarkan kegiatannya, baik untuk publik maupun daerah. Apabila pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya.

Menurut (Lailan, 2011) pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu Pengeluaran Rutin dan pengeluaran Pembangunan. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara. Sedangkan pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan, baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun non fisik selalu disesuaikan

dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan (Lailan, 2011).

Menentukan besarnya jumlah pengeluaran, pemerintah tentu sangat berhati-hati dalam memperhitungkan besaran pengeluaran yang harus dikeluarkan, karena jika hal tersebut tidak dilakukan dengan hati-hati maka akan berdampak kepada pihak-pihak tertentu dari kebijakan yang dibuat langsung oleh pemerintah. Pemerintah tentunya dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat selain fungsinya yang bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi suatu negara, dalam suatu perekonomian.

Pengeluaran agregat dapat dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu, konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor (Agustina, 2015). Berikut merupakan pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsinya yaitu sebagai berikut: Pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum merupakan pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat maupun pihak swasta untuk pembayaran gaji, akses layanan suatu perizinan, kemudahan informasi dan belanja operasional kebutuhan perkantoran sehari-hari, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan sarana dan prasarana umum, serta memicu peningkatan perekonomian masyarakat, pengeluaran ini ditujukan agar mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mempunyai *multiplier effect* (Agustina, 2015).

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Baldacci et al menyatakan *“But a greater share of investment in human capital should be channeled toward primary education”* (bagian yang lebih besar dari investasi dalam modal manusia

harus disalurkan menuju pendidikan). Masalah yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi pendidikan yang tidak merata. Di sisi lain hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pembangunan ekonomi merupakan dua mata rantai yang saling berkaitan (Agustina, 2015).

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Belanja kesehatan dapat meningkatkan pembangunan manusia melalui dua saluran yaitu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kematian serta meningkatkan proses pembelajaran (Abjan, 2016).

Pengeluaran pemerintah bidang ketertiban dan keamanan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka mendukung ketahanan dan keamanandaerah, pengeluaran pemerintah bidang pariwisata dan budaya, merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan dalam rangka untuk meningkatkan potensi pariwisata daerah. Promosi serta sekaligus dalam rangka mempertahankan kelestarian budaya daerah, pengeluaran pemerintah bidang perlindungan dan jaminan Sosial, merupakan pengeluaran untuk jaminan perlindungan masyarakat seperti penanganan bencana dan permasalahan social (Abjan, 2016).

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia Terhadap *Stunting*

Gupta dkk (2015) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan dapat memberikan efek positif terhadap modal sumberdaya manusia yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan di saat bersamaan meningkatkan kesetaraan dan menurunkan

angka prevalensi *stunting*. Sutriyono (2017) menjelaskan bahwa ketika pemerintah menggunakan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi untuk membiayai layanan kesehatan dasar dan akses terhadap pendidikan bagi semua akan membawa keuntungan ganda bagi masyarakat, yaitu tingkat kesehatan dan pendidikan yang lebih baik serta akan meningkatkan konsumsi mereka.

Tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa kini sekaligus persiapan bagi kehidupan di masa yang akan datang. Indikator tingkat pendidikan salah satunya adalah jenjang pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin banyak informasi yang diperoleh sehingga makin tinggi pengetahuannya. Sedangkan tingkat pendidikan yang rendah akan lebih sulit untuk memperoleh arahan, dalam pemenuhan gizi ataupun pentingnya pelayanan kesehatan lainnya yang menunjang dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, Cholifatun (2015),

Tingkat pendidikan memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah *stunting*. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Cholifatun (2015), dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin banyak pengetahuan yang diperoleh seperti pola asuh terhadap anaknya, dengan demikian akan mengurangi angka prevalensi *stunting*. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat kesehatan adalah seberapa besar tingkat pembiayaan untuk sektor kesehatan. Besarnya belanja kesehatan berhubungan positif dengan pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Indonesia menduduki peringkat ke lima dunia dengan angka lebih dari 7,6 juta anak yang pertumbuhannya tidak maksimal.

Lebih dari sepertiga anak usia dibawah lima tahun di Indonesia mengalami pertumbuhan badan yang tidak sesuai dengan standar ukuran internasional untuk tinggi dan berbanding usia, dibalik pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 20 tahun terakhir, masih banyak ditemukan anak kekurangan gizi diberbagai daerah, (Andriani, 2014).

Penelitian (Bella, et al, 2020) menyebutkan pola dalam mengasuh di keluarga mencakup kebiasaan memberi makanan, kebiasaan mengasuh, kebiasaan dalam hal yang bersih serta kebiasaan memperoleh layanan kesehatan berkaitan terhadap peristiwa *stunting* balita. Masalah gizi balita *stunting* tidak mutlak ada dalam keluarga miskin namun dikarenakan peran dalam pola mengasuh yakni kebiasaan dalam memberi makanan, mengasuh, hal yang bersih serta kebiasaan saat memperoleh layanan kesehatan dikeluarga miskin bisa menurunkan kecenderungannya dalam mendapatkan *stunting*.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Fithri, 2017).

Belanja Kesehatan anak menjadi kunci dalam upaya menekan angka kejadian *stunting*. Pertumbuhan linier yakni indikator keseluruhannya yang paling baik dalam kemakmuran anak serta memberi tanda yang tepat terkait ketidak selarasan pada perkembangan individu. Hal tersebut terefleksikan dalam banyak anak pada dunia yang mengalami kegagalan dalam pencapaian potensinya di pertumbuhan liner. Hal tersebut dikarenakan keadaan kesehatannya yang kurang maksimal serta nutrisi yang tidak mumpuni maupun perawatannya sehingga mereka mengalami kerusakan fisik serta kognitif yang parah dan diiringi dengan

pertumbuhann yang kurang, (Onis & Branca, 2016). Hasil penelitian Hasanah (2017) menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan, pendapatan per kapita dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan secara simultan mempengaruhi sektor kesehatan di Indonesia.

2.2.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya Terhadap *Stunting*

Gupta, dkk (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah Bidang lainnya diyakini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berdampak negatif terhadap *Stunting*. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang lainnya akan berdampak terhadap peningkatan angka harapan hidup dan pada giiringnya akan berdampak pada peningkatan kapasitas dan kualitas kerja masyarakat. Kondisi tersebut pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan akan berakibat pada menurunnya angka prevalensi *stunting*.

Menurut kuncoro (2013) belanja bidang lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah. Belanja pembangunan disini meliputi pengadaan dan perbaikan fasilitas dan sarana penunjang lainnya, dengan ditambahnya infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah tentunya akan meningkatkan perekonomian di daerah.

Siregar, dkk (2020) menyatakan bahwa jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak perekonomian daerah menjadi lebih baik. Belanja pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah.

Belanja atau pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan investasi pemerintah karena pengeluaran pemerintah bidang ekonomi meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi, memberikan subsidi dan beasiswa (Sukirno, 2012).

Pengeluaran pemerintah yang berupa investasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan PDRB, meningkatkan konsumsi masyarakat dan menurunkan angka prevalensi *stunting* setiap daerah. Ketersediaan barang atau jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat atau swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Arsyad, 2010).

2.2.3. Hubungan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Terhadap *Stunting*

Sukirno (2012) mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan nilai pembelajaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Belanja berbagai jenis barang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, digolongkan sebagai konsumsi. Banyak alasan yang menyebabkan analisis makroekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumah tangga secara mendalam, karena pola konsumsi yang tidak sehat dapat berdampak pada kejadian *stunting*.

Selain itu juga pola konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional serta pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya, French, et al (2019). Pengeluaran konsumsi masyarakat erat kaitannya dengan pendapatan semakin tinggi pendapatn seseorang maka daya beli masyarakat juga akan meningkat sehingga meningkatkan pengeluarankonsumsi

yang dimana merupakan salah satu solusi untuk menurunkan angka prevalensi *stunting*, seperti yang dikemukakan oleh (Beal *et al.*, 2017) yang mengemukakan bahwa fakto-faktor social ekonomi seperti pendapatan keluarga berpengaruh terhadap kejadian *stunting* yang mengarah pada buruknya kualitas dan kuantitas asupan gizi serta meningkatnya insiden penyakit.

Pendapatan keluarga dalam hal ini terkait dengan penyediaan makanan keluarga, akses makanan dalam keluarga dan distribusimakanan yang memadai untuk keluarga. Daya beli untuk makanan bergizi dalam keluarga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, karena dalam menentukan jenis pangan yang akan dibeli tergantung pada tinggi rendahnya pendapatan, dengan pendapatan yang tinggi dapat dimungkinkan terpenuhinya kebutuhan makanan seluruh anggota keluarha khususnya makanan dengan kualitas dan nutrisi yang baik untuk asupan gizi keluarga (Omondi dan Kirabira, 2016).

Namun, sebaliknya, tingkat pendapatan keluarga yang rendah mengakibatkan rendahnya daya beli pangan rumah tangga (Andriani dalam Illahi, 2017). Daya beli terhadap bahan pangan yang rendah menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan zat gizi balita (Ranoor, 2010). Peneitian (Keino *et al.*, 2014) menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pendapatan berpengaruh terhadap adanya kejadian *stunting*. Bahkan menurut (Ni'mah, dan Nadhiroh, 2015) keluarga dengan pedapatan rendah berisiko 3,25 kali memiliki anak dengan *stunting*.

Penelitian Widyadiningsih (2018) menunjukkan terdapat hubungan negative dan signifikan antara pengeluaran konsumsi masyarakat dengan kejadian *stunting* pada balita usia 24-59 bulan. Asupan gizi yang kurang pada balita usia 6-24 bulan di kabupaten Bantul, Yogyakarta memiliki peluang 16,67 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita usia 6-24 bulan yang memiliki asupan gizi yang tinggi (Paramashanti *et al.*, 2017).

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian *stunting* (Alzikri, 2021; Margiana, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Hooshmand *et al.*, 2013) menunjukkan bahwa balita yang status gizinya baik memiliki asupan gizi yang baik pula, yang diiringi dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi yang dilakukan orang tua balita. Semakin baik asupan gizi yang dikonsumsi balita, maka berbanding lurus pula dengan peningkatan tinggi badannya. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sied (2016) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi asupan gizi yang dikonsumsi balita, maka semakin baik pula status gizi TB/Unya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengeluaran konsumsi masyarakat menurut Suryana (2008) faktor internal yaitu pendapatan, pengetahuan, gizi, budaya, serta preferensi. Berdasarkan hasil penelitian ini balita yang memiliki asupan gizi yang rendah, diketahui bahwa Sebagian besar faktor pendapatan dan preferensi yang menjadi hambatan balita untuk dapat mengonsumsi makanan yang bergizi.

Rendahnya status ekonomi keluarga berdampak pada kemungkinan anak menjadi kurus dan pendek (UNICEF, 2013). Beberapa hasil penelitian menunjukkan sebagian besar rumah tangga memiliki pengeluaran konsumsi yang berada dibawah rata-rata, dimana pengeluaran konsumsi memiliki hubungan dengan terjadinya *stunting*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian *et al* suryana (2022) bahwa pengeluaran konsumsi memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian *stunting* pada balita. pengeluaran yang berada di bawah rata-rata berbanding lurus dengan pendapatan rumah tangga yang juga sebagian besar di bawah rata-rata.

Penelitian Pujoharso (2013) menunjukkan bahwa ketika pendapatan mengalami peningkatan, maka pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga juga meningkat, begitupun sebaliknya. Pola konsumsi masyarakat Indonesia dalam kurung waktu dua puluh tahun hampir tidak mengalami perubahan. Pada tahun 1984 konsumsi masyarakat Indonesia sekitar 63,24 persen dari konsumsinya dialokasikan untuk makanan dan setiap tahun terus mengalami penurunan sehingga mencapai 6,86 persen pada tahun 1993 (Dumairy,2004).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh French, *et al*, (2019) menunjukkan bahwa pola pemberian makanan yang tepat, sebagian besar terdapat pada orang tua yang berpendapatan tinggi yaitu sebanyak 15 orang (75,0 persen) dibandingkan dengan orang tua yang berpenghasilan rendah sebanyak 19 orang (1,3 persen). Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara penghasilan keluarga dengan pola pemberian makan pada balita untuk mencegah terjadinya *stunting*.

Orang tua yang memiliki penghasilan tinggi memiliki pengaruh dalam pola pemberian makan tepat lebih besar dibandingkan dengan orang tua yang memiliki penghasilan rendah. Hal ini dikarenakan orang tua dengan penghasilan tinggi lebih bisa memenuhi kebutuhan anak dalam hal pemberian makan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan orang tua yang berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wira dan Syamsul (2018) yang menyatakan bahwa penghasilan yang tinggi akan mempengaruhi daya beli keluarga baik secara kuantitas dan kualitas makanan yang diberikan kepada balita, French, *et al* (2019).

Pada penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Malimongan Baru didapatkan jika pada pola pemberian makan tidak tepat sebagian besar terdapat pada orang tua yang berpenghasilan rendah dan didapatkan pula

sebagian besar balita kurang mengonsumsi buah dan susu dikarenakan ketersediaan dalam rumah tangga terbatas akibat penghasilan keluarga yang rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana (2019) yang mengatakan bahwa penghasilan keluarga yang kurang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak sehingga mencegah terjadinya kejadian *stunting*.

Pada suatu keluarga dengan penghasilan rendah, akan kesulitan untuk mencukupi pangan berkualitas bagi keluarga. French, *et al* (2019) menemukan bahwa keluarga dengan penghasilan rendah akan cenderung lebih sedikit mengonsumsi makanan sehat dibandingkan dengan keluarga dengan pendapatan tinggi. Besar kecilnya penghasilan rumah tangga dapat memediasi pola pembelian makan yang nantinya akan menentukan kualitas. Banyak alasan yang menyebabkan analisis makroekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumah tangga secara mendalam, karena pola konsumsi yang tidak sehat dapat berdampak pada kejadian *stunting*.

Selain itu juga pola konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional serta pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya, French, *et al* (2019). Prasetyo (2013) mengemukakan bahwa faktor-faktor pengeluaran konsumsi adalah pendapatan, selera, faktor sosial kultur, kekayaan, hutang pemerintah, *capital gain*, tingkat suku bunga, tingkat harga, *money illusion*, distribusi, umur, letak geografis dan distribusi pendapatan. Pada dasarnya faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumsi adalah pendapatan namun tidak dapat dipengaruhi terhadap faktor-faktor yang lain cukup berpengaruh kuat terhadap konsumsi masyarakat.

2.2.4. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap *Stunting*

Stunting pada balita berdampak terhadap tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan (TNP2K, 2018). *Stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja. Bukti yang ditunjukkan diantaranya hilangnya 11 persen GDP dan mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen. *Stunting* juga memperburuk kesenjangan/inequality yang menyebabkan pengurangan 10 persen dari total pendapatan seumur hidup dan menimbulkan kemiskinan antar generasi (World Bank Group 2016).

Penelitian Heltberg (2009) menemukan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kekurangan gizi anak kronis, yang signifikan secara statistik tapi dengan nilai yang cukup kecil. Peningkatan GNI perkapita sebesar 0,2 persen akan menurunkan *stunting* sebesar 30 persen dalam jangka waktu 25 tahun, sementara melalui peningkatan 3,7 persen pertumbuhan ekonomi saja akan menurunkan *stunting* sebesar 30 persen dalam jangka waktu 25 tahun dan peningkatan pertumbuhan perkapita nyata sebesar 5 persen akan menurunkan *stunting* sebesar 50 persen. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi penurunan Tingkat *stunting*.

Headey (2013) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prediktor kuat kinerja gizi salah satunya dalam pertumbuhan produksi pangan. Pemenuhan pangan yang cukup akan mengakibatkan terpenuhinya asupan gizi, yang akan berdampak pada produktivitas seseorang, serta akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi mengarah kepada penurunan *stunting* dalam waktu yang relative singkat. Penelitian Mary (2018) mengemukakan bahwa *stunting* dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Galasso (2019) kejadian *stunting* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana proses kelahiran yang terbilang rendah akibat kekurangan gizi dapat menyebabkan berat badan bayi yang dilahirkan rendah sehingga menyebabkan terjadinya kerugian produktivitas antara 2 persen dan 11 persen dari PDB. Ini berarti bahwa perkembangan seseorang pada masa balita akan mempengaruhi produktivitas pada saat dewasa.

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran perubahan besarnya PDB. Semakin besar PDB berarti pendapatan juga meningkat yang akan mempengaruhi daya beli, kemudian berpengaruh pada tingkat konsumsi dan asupan gizi yang akhirnya mempengaruhi kejadian *stunting*. Makin besar pertumbuhan ekonomi maka kejadian *stunting* akan semakin kecil, Wahyuni (2020). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah dicapai sebelumnya. Artinya, pertumbuhan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di 10 wilayah tertinggi Indonesia selama kurung waktu 2010-2019 mengalami peningkatan secara terus menerus (Soleh, 2015). Penelitian Kusumawardhani dan Martianto (2011), menunjukkan nilai slope negative antara PDB dengan prevalensi gizi buruk balita, yang bermakna semakin tinggi nilai PDB suatu negara maka akan semakin rendah prevalensi gizi buruk di negara tersebut. Hal ini dikarenakan nilai PDB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Wahyuni (2020), dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi akan mendorong kesempatan kerja yang semakin luas sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan menyebabkan *stunting* menjadi turun.

Grantham *et al* (2011) menyimpulkan bahwa anak *stunting* mengalami hambatan dikelas dan mengalami penurunan kemampuan atau kinerja di sekolah, serta setiap tahun memprediksi penurunan upah masa depan akan memprediksi penurunan upah masa depan akan sebesar 8,3 persen Ketika mereka dewasa dan bekerja. Menurut Goa dan Smyth (2010) di China pada 12 kota yang diteliti, menunjukkan peningkatan tinggi badan sebanyak 1 cm pada pria dapat meningkatkan pendapatan sebesar 4,5 persen dan 7,3 persen pada Wanita.

Hasil ini menunjukkan bahwa jika seseorang dengan tinggi badan normal akan lebih produktif sehingga mendapatkan gaji/pendapatan lebih baik. Sedangkan masalah *stunting* ini sendiri mempengaruhi ekonomi individu dan wilayah, sehingga investasi negara untuk sumber daya manusia menjadi menurun. Secara nasional besar potensi ekonomi yang hilang akibat kekurangan gizi (*stunting*) yang mempengaruhi pertumbuhan balita sebesar 0,27-1,21 persen dari PDB Indonesia atau nilainya antara 4,24 hingga 19,08 triliun rupiah pertahun (Aries & Martianto 2006).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masalah *stunting* berdasarkan indikator BB/U menggambarkan status gizi yang bersifat umum (tidak spesifik) dan tidak menggambarkan masalah gizi bersifat kronis atau akut. Penelitian meta-analisis dari 45 studi logatudinal di Amerika Serikat menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara tinggi badan dengan sukses karir dan gaji di lingkungan pekerjaan. Seseorang dengan tinggibadan enam kaki atau 1,82 m rata-rata menghasilkan gaji selama 30 tahun berkarir sekitar \$166.000 lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang tinggi badan lima kaki lima inci atau 1,55 m (Judge & Cable 2004). Hal ini menunjukkan bahwa tinggi badan seseorang mempengaruhi jenis pekerjaan, pendapatan dan produktivitas kerjanya.

Keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan *stunting* juga kian dituntut sigap mengingat dampak *stunting* terhadap perekonomian tidak kecil. Berdasarkan data yang diolah World Bank Investing in Early Years Brief, 2016, *Stunting* dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja terhambat serta memperburuk kesenjangan/inequality. Catatan Bank Dunia (2016) menyatakan bahwa dalam jangka Panjang *stunting* dapat menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3 persen dari PDB pertahun. Jika PDB Indonesia sebesar Rp.13.000 triliun, diperkirakan potensi kerugian akibat *stunting* dapat mencapai Rp.260 triliun-390 triliun per tahun. Ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi *stunting* pun berpotensi mendapatkan penghasilan 20 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami *stunting*.

2.2.5. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia Terhadap Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

Sukirno (2012) mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan nilai pembelajaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Belanja berbagai jenis barang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, digolongkan sebagai konsumsi. Sedangkan barang-barang yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. Pola konsumsi masyarakat berdasarkan alokasi penggunaannya dapat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pola konsumsi masyarakat Indonesia dalam kurung waktu dua puluh tahun hampir tidak mengalami perubahan. Pada tahun 1984 konsumsi masyarakat Indonesia sekitar 63,24 persen dari konsumsinya dialokasikan untuk makanan dan setiap tahun terus mengalami penurunan sehingga mencapai 6,86 persen pada tahun 1993 (Dumairy, 2004).

Banyak alasan yang menyebabkan analisis makroekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumah tangga secara mendalam. Alasan pertama, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya, (Dumairy,2004). Setiap tahunnya penduduk Indonesia selalu meningkat, kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa juga meningkat.

Pada pertengahan tahun 1997 sampai tahun 1998, konsumsi masyarakat Indonesia sempat mengalami penurunan karena terjadi Krisis nilai tukar rupiah yang terus mengalami (Depresiasi), yang kemudian disusul dengan Krisis moneter dan pada akhirnya berubah menjadi krisis ekonomi yang menimbulkan konsekuensi terhadap ketidak stabilan perekonomian Indonesia, dari kebijakan tersebut berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat karena pendapatan masyarakat tetap sementara harga-harga barang dan jasa naik. Selain itu juga tingkat suku bunga mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal ini menimbulkan konsumsi masyarakat mengalami penurunan karena masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank dengan kompesasi bunga dari pada konsumsi, (Brilliant, 2020). Naga (2016) mengemukakan bahwa faktor-faktor pengeluaran konsumsi adalah pendapatan, selera, faktor sosial kultur, kekayaan, hutang pemerintah, *capital gain*, tingkat suku bunga, tingkat harga, *money illusion*, distribusi, umur, letak geografis dan distribusi pendapatan. Pada dasarnya faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumsi adalah pendapatan namun tidak dapat dipengaruhi terhadap faktor-faktor yang lain cukup berpengaruh kuat terhadap konsumsi masyarakat.

(Ani, 2010) mengemukakan bahwa salah satu kebijakan fiskal oleh pemerintah adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau dapat juga dikaitkan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

2.2.6. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya Terhadap Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

Menurut kuncoro (2013) belanja bidang lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah. Belanja pembangunan disini meliputi pengadaan dan perbaikan fasilitas dan sarana penunjang lainnya, dengan ditambahkan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah tentunya akan meningkatkan perekonomian di daerah. Siregar (2020) menyatakan bahwa jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak perekonomian daerah menjadi lebih baik.

Puspitasari, dkk (2018) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah Bidang lainnya diyakini memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang lainnya akan berdampak terhadap peningkatan angka harapan hidup dan pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kapasitas dan kualitas kerja masyarakat. Kondisi tersebut pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang diiringi dengan meningkatnya konsumsi masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan dalam masyarakat.

Belanja pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Belanja atau pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan investasi pemerintah karena pengeluaran pemerintah bidang ekonomi meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi, memberikan subsidi dan beasiswa (Sukirno, 2012).

Pengeluaran pemerintah yang berupa investasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, meningkatkan konsumsi masyarakat setiap daerah. Ketersediaan barang atau jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat atau swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Subandi, 2019).

2.2.7. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Sumber Daya Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Pendidikan dan kesehatan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia (SDM) yang dapat memberi keuntungan di masa mendatang, baik pada masyarakat atau negara. Pendidikan dan Kesehatan merupakan kebutuhan mutlak manusia yang harus dipenuhi, yang menjadi cerminan bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu negara, dengan semakin baik pendidikan dan kesehatan di suatu negara maka akan semakin baik pula kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari segi spiritual intelegensi maupun skill, Jatmiko (2017).

Teori neoklasik Adam Smith menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, dimana pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian serta kualitas manusia, dengan SDM yang berkualitas tentunya akan menciptakan produktivitas yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan Produk Domestik

Regional Bruto suatu daerah dengan demikian juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Jatmiko (2017).

Jatmiko (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh perubahan Anggaran Belanja Negara di sektor pendidikan terhadap PDB Indonesia. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa memang terdapat hubungan antara perubahan anggaran belanja negara di sektor Pendidikan dan terhadap PDB Indonesia, tidak hanya berhubungan positif dimana seiring berjalannya waktu nominal anggaran belanja negara sektor pendidikan terhadap PDB sama-sama memiliki trend positif namun juga berhubungan terbalik antara perubahan dua variable setiap tahunnya.

Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti adanya inflasi, kebijakan fiskal pada jenis fungsi belanja negara lainnya selain belanja di sektor pendidikan yang tentu memiliki prioritas tertentu, serta yang paling mungkin adalah efisiensi dan penggunaan dana pengeluaran belanja pada pengembangan pendidikan yang disalurkan melalui program-program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BSM dan Bidik Misi, dalam penelitian ini pengeluaran anggaran bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan serta memiliki hubungan yang erat terhadap PDB di Indonesia hal tersebut dapat diartikan pengeluaran anggaran bidang pendidikan dan anggaran belanja lainnya memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (Jatmiko, 2017).

Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang. Menurut Todaro (2015), pendidikan yang kurang memadai dan tidak dikembangkan secara terus menerus tentu akan membuat suatu bangsa tidak siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain, perluasan kesempatan bersekolah dalam segala Tingkat telah mendorong pertumbuhan ekonomi secara agresif melalui terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena pengetahuan dan bekal keterampilan yang lebih baik, tersediannya kesempatan

kerja yang lebih luas, terciptanya kelompok pimpinan yang terdidik untuk mengisi lowongan di suatu unit usaha atau lembaga dan terciptanya berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk membina sikap-sikap modern.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung perekonomian, (Jatmiko, 2017).

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Kesehatan merupakan suatu kebutuhan (*need*) yang diartikan secara umum yang merupakan perbandingan antara situasi nyata dan standar teknis tertentu yang telah disepakati. Selain itu juga, kesehatan merupakan kebutuhan yang dirasakan sendiri oleh individu, sehingga Keputusan untuk memanfaatkan suatu pelayanan kesehatan merupakan pencerminan kombinasi normative dan kebutuhan yang dirasakan, Suparno (2014).

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok dimana tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat bekerja dan akan berpengaruh pada produktivitas secara agregat. Sebagai negara dalam tahap pengembangan menengah, maka pengeluaran negara dalam bidang kesehatan masih sangat diperlukan di Indonesia, meskipun dewasa ini pelayanan kesehatan yang disediakan swasta semakin banyak. Pengeluaran ini utamanya untuk menyediakan layanan kesehatan yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan sebagaimana mestinya, Suparno (2014).

Pengeluaran dibidang kesehatan ini semakin diperhatikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 171 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Alokasi anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua atau pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD, Suparno (2014).

Pengeluaran di bidang kesehatan mencerminkan upaya pemerintah upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD, (Cordelia. 2019). Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, semakin tinggi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan maka akan semakin baik pula sarana prasarana dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian yang mampu meningkatkan kondisi perekonomian negara, (Grafton, dkk. 2018).

Menurut (Puspita, dkk. 2018) pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2017) dimana pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan harus diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Todaro, 2018).

Teori tersebut didukung oleh (Hatta, 2018) bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan (Septiani, 2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan teori penelitian yang didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ilyas, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah di sektor kesehatan akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia yang handal dan sehat akan semakin bertambah. Meningkatnya taraf kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan menciptakan perbaikan ekonomi masyarakat, (Hasan, 2018).

2.2.8. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Lainnya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2012), kenaikan belanja pemerintah sebesar (ΔG) akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah tersebut untuk semua tingkat pendapatan. Peningkatan tersebut berhasil mengubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti terjadi peningkatan pendapatan Y_1 ke Y_2 kenaikan pendapatan (ΔY) melebihi kenaikan belanja pemerintah (ΔG).

Jika kebijakan fiskal berupa belanja daerah atau pengeluaran pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan. Pengeluaran pemerintah memiliki dampak langsung terhadap permintaan agregat terhadap barang dan jasa yang selanjutnya akan mempengaruhi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Hukum Wagner mengemukakan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap PDB yang didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, U.S dan Jepang pada abad ke-19. Menurut Wagner dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Sedangkan teori Peacock dan Wisema berisi tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Menurut mereka meningkatnya pendapatan nasional menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar dan begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Mardiana, 2017).

Belanja pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Belanja atau pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan investasi pemerintah karena pengeluaran pemerintah bidang ekonomi meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi, memberikan subsidi dan beasiswa (Sukirno, 2016). Penelitian yang dilakukan Anggraini (2020) tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah yang berupa investasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan barang atau jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat atau swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Subandi, 2014:88). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kharisma (2018) tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi tahun 2010-2016 yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi.

Menurut kuncoro (2013) belanja pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah. Belanja pembangunan disini meliputi pengadaan dan perbaikan fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan sarana penunjang lainnya, dengan ditambahnya infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah tentunya akan meningkatkan perekonomian di daerah.

Arsa (2015) menyatakan bahwa jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong perekonomian daerah menjadi lebih baik. Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsector, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi.

Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan Pembangunan terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan kemudian melakukan

pembangunan infrastruktur keseluruhan bagian wilayahnya Arsa (2015). Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur. Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Friawan (2008) menjelaskan setidaknya ada 3 alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi, misalnya *studi The World Bank (2004)* menyatakan bahwa Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi 1998 salah satunya dipengaruhi rendahnya tingkat investasi.

Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia. Permasalahan infrastruktur di Indonesia diakibatkan oleh masalah sektoral dan lintas sektoral.

Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani sektor-sektor terkait, Friawan (2008) Seperti di sisi pembiayaan pemerintah diharapkan mampu membuat mekanisme penentuan resiko investasi dan pengembangan metodologi yang dapat secara mudah diterapkan, di saat bersamaan mengingat mobilisasi investasi dari sektor swasta membutuhkan waktu, pemerintah diharapkan tetap memberikan perhatian pada peningkatan investasi publik sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi.

Salah satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur, namun jika pengeluaran pemerintah saja tidak cukup diperlukan peran swasta, Friawan (2008). Peran pemerintah untuk meningkatkan perhatian pihak swasta adalah dengan bantuan pembebasan lahan, subsidi operasional dan modal dan jaminan risiko usaha. Peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur juga harus diikuti dengan efektivitas dan efisiensi dari pengeluaran pemerintah tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan agar terciptanya transportasi dalam proses pengadaan barang dan pembangunan, Friawan (2008).

Gupta, dkk (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah Bidang lainnya diyakini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang lainnya akan berdampak terhadap peningkatan angka harapan hidup dan pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kapasitas dan kualitas kerja masyarakat. Kondisi tersebut pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi.

2.2.9. Hubungan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Konsumsi rumah tangga biasanya menjadi salah satu acuan perhitungan dalam analisis makro, dimana terdapat beberapa alasan yang menggunakan perhitungan belanja konsumsi rumah tangga yaitu karena alasan konsumsi rumah tangga telah memberikan pemasukan yang besar untuk pendapatan sebuah negara kemudian pertimbangan bahwa besarnya pengeluaran untuk konsumsi berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh sehingga semakin besar pula fluktuasi kegiatan ekonomi suatu negara (Sudirman & Alhudhori, 2018).

Teori konsumsi absolut yang dikembangkan oleh Keynes mengedepankan analisis perhitungan statistik serta membuat hipotesa berdasarkan observasi kasual, Keynes menganggap perhitungan fluktuasi ekonomi negara dapat dihitung berdasarkan besarnya konsumsi dan pendapatan belanja rumah tangga, pada pengeluaran rumah tangga selalu terdapat pengeluaran untuk konsumsi walaupun tidak memiliki pendapatan. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, namun penambahan konsumsi yang terjadi lebih rendah dari pada penambahan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat, baik itu untuk konsumsi barang tidak tahan lama, barang tahan lama dan jasa. Semakin tinggi konsumsi masyarakat, maka pertumbuhan ekonomipun akan ikut meningkat (Muh.Rusdiansyah, 2014). Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, pakaian, biaya jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Keputusan konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh keseluruhan perilaku baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan konsumsi rumah tangga untuk jangka panjang adalah penting karena peranannya dalam pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk analisa jangka pendek peranannya penting dalam menentukan permintaan agregat, konsumsi dua pertiga dari GDP, (Sukirno, 2012). Keynes memiliki konsumsi absolut yang disebut sebagai Teori Konsumsi Keynes (*Absolut Income Hypothesis*). Keynes berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga, tergantung dari pendapatan yang dihasilkan.

Perbandingan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut Keynes sebagai *Marginal Propensity to Consume* (MPC). MPC ini digunakan untuk mengukur bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka tingkat konsumsi rumah tangga juga akan meningkat begitupun sebaliknya jika pendapatan yang dimiliki rendah maka konsumsi rumah tangga tersebut juga akan ikut menurun, (Sukirno, 2012).

2.3. Tinjauan Empiris

Beberapa hasil studi empiris lainnya yang menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap *stunting* menemukan hasil yang berbeda diantara para peneliti. Sebagian peneliti berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial berpengaruh signifikan terhadap penurunan *stunting*. Sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan diantara hubungan variabel tersebut. Namun sebagian lainnya juga berpendapat bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan diantara hubungan variabel tersebut

Cipriano *et al.*, (2019) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan, konsumsi pangan, sosial ekonomi terhadap kejadian *stunting* di Timor Leste, dengan menggunakan metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini bagaimana hubungan pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan, konsumsi pangan dan sosial ekonomi terhadap kejadian *stunting* di Timor Leste. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, konsumsi pangan dan sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian *stunting*.

Ali (2018) meneliti tentang hubungan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dengan *stunting* di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dominan mempengaruhi kejadian *stunting* di Indonesia. Ada faktor-faktor lain yang berpengaruh lebih besar

menjadi penyebab prevalensi *stunting*, dengan demikian, upaya pemerintah tidaklah dapat dijadikan sebagai kebijakan utama yang secara langsung dapat untuk menurunkan kejadian *stunting* di Indonesia.

Widyaningsih (2018) menganalisis mengenai pengaruh pengeluaran konsumsi Masyarakat dengan kejadian *stunting* di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dengan menggunakan metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai pengaruh pengeluaran konsumsi Masyarakat dengan kejadian *stunting*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengeluaran konsumsi masyarakat dengan kejadian *stunting* di kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Cholifatun (2015) menganalisis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan *stunting* di provinsi Maluku dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah *stunting* di Provinsi Maluku.

Ibrahim dan Faramita (2015) menganalisis tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kejadian *stunting* di Puskesmas Barombong Kota Makassar, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejadian *stunting*.

Ade (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh kondisi social ekonomi terhadap kejadian *stunting* di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis pengaruh kondisi social ekonomi terhadap kejadian *stunting* di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejadian *stunting*. Sedangkan status sosial (Tingkat kemiskinan) berpengaruh negative terhadap kejadian *stunting*, namun secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan. Tidak

signifikannya pengaruh tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran Masyarakat akan gizi.

Odhiambo (2015) meneliti mengenai pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan. Metode yang digunakan adalah dengan *developed autoregressive distributed lag model (ARDL)* disebabkan peneliti ingin membuktikan dua pandangan berbeda sekaligus dalam hubungan pengeluaran dan pertumbuhan tersebut, di satu sisi pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi (Keynesian). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong naiknya belanja pemerintah menurut hukum Wagner. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terjadi hubungan saling mempengaruhi antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

Donald dan Shuanglin (2016) menganalisis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesejahteraan dan pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 47 negara dalam 10 tahun dan 58 negara dalam 11 tahun. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pengeluaran sektor kesejahteraan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap beberapa negara tetapi tidak signifikan pada negara lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2017) tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi tahun 2010-2016. Menggunakan data sekunder, dengan alat *Analysis Regresi Linear Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi 2010-2016.

Rusdiansyah (2014) meneliti tentang pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2000-2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada teori dan studi empiris yang telah dikemukakan sebelumnya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara pengeluaran pemerintah untuk bidang SDM dan bidang lainnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran konsumsi masyarakat dan *stunting*.

Peningkatan Pengeluaran pemerintah terhadap bidang SDM dan bidang lainnya tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat suatu daerah terutama mengenai penurunan angka prevalensi *stunting*, dengan memadainya ketersediaan pengeluaran pemerintah tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap penurunan angka *stunting* yang dimana jika angka prevalensi *stunting* dapat diatasi maka tentu saja akan berpengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diiringi dengan meningkatnya peningkatan konsumsi masyarakat yang disebabkan dengan meningkatnya pendapatan, dan tentu saja akan berdampak pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan akan tercipta, Widyaningsih (2014).

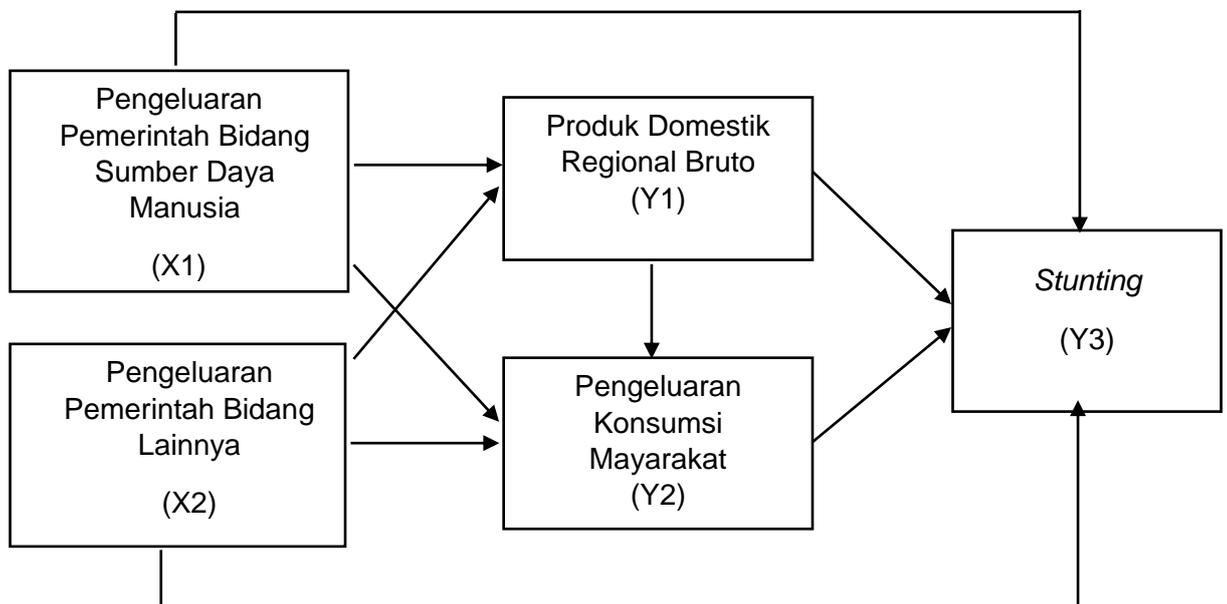
Variabel bidang SDM dari penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan yang negatif terhadap *stunting* dimana pendidikan dan Kesehatan dapat memberikan efek positif terhadap modal sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan produk domestik regional bruto yang tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan disaat bersamaan meningkatkan konsumsi masyarakat dan menurunkan angka prevalensi *stunting*, Gupta (2014).

Pengeluaran bidang kesehatan merupakan salah satu hal penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi karena berhubungan dengan kemampuan seseorang menerima dan memahami sesuatu, sedangkan tingkat pendidikan seorang ibu dapat mempengaruhi pola konsumsi melalui cara pemilihan makanan pada balita. Pendidikan dan kesehatan muncul sebagai predictor utama *stunting* yang memiliki hubungan yang kuat dan konsisten dengan status gizi buruk. Grafton, dkk (2004) menjelaskan bahwa ketika pemerintah menggunakan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi untuk membiayai layanan kesehatan dasar dan akses terhadap pendidikan bagi semua akan membawa keuntungan ganda bagi masyarakat miskin, yaitu tingkat kesehatan dan pendidikan yang lebih baik serta akan meningkatkan konsumsi mereka.

Pengeluaran Pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibanding pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Bertambahnya pengeluaran pada modal manusia oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut akan berdampak pada semakin tingginya pengetahuan dan tingkat kesehatan maka berdampak pada produktivitas. Peranan manusia dalam pembangunan ekonomi terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan perekonomian, penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, Grafton, dkk (2004).

Gupta, dkk (2014) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah Bidang lainnya diyakini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi masyarakat dan berdampak negative terhadap *Stunting*. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang lainnya akan berdampak terhadap peningkatan angka harapan hidup dan pada giiringnya akan berdampak pada peningkatan kapasitas dan kualitas kerja masyarakat. Kondisi tersebut pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang

diiringi dengan meningkatnya konsumsi masyarakat karena pendapatan meningkat dan akan berakibat pada menurunnya angka prevalensi *stunting*. Berdasarkan gambaran tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengembangkan sebuah model penelitian. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan untuk memperjelas kerangka pikir penelitian, maka hubungan-hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut kuncoro (2004: 90) belanja bidang lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah. Belanja pembangunan disini meliputi pengadaan dan perbaikan fasilitas dan sarana penunjang lainnya, dengan ditambahnya infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah tentunya akan meningkatkan perekonomian di daerah. Saragih (2003:115) menyatakan bahwa jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak perekonomian daerah menjadi lebih baik.

Belanja pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Belanja atau pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan investasi pemerintah karena pengeluaran pemerintah bidang ekonomi meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi, memberikan subsidi dan beasiswa (Sukirno, 2015:97).

Pengeluaran pemerintah yang berupa investasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan PDRB, meningkatkan konsumsi masyarakat dan menurunkan angka prevalensi *stunting* setiap daerah. Ketersediaan barang atau jasa public ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat atau swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Subandi, 2014:88).

3.2. Hipotesis

Dari pembahasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah bidang sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap *stunting* melalui produk domestik regional bruto dan pengeluaran konsumsi masyarakat di kawasan timur Indonesia.
2. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah bidang lainnya manusia berpengaruh negatif terhadap *stunting* melalui produk domestik regional bruto dan pengeluaran konsumsi masyarakat di kawasan timur Indonesia.